

RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU, KABUPATEN TASIKMALAYA (1975-2010)

*THE RESPONSE OF THE KAMPUNG NAGA COMMUNITY
TO TOURISM DEVELOPMENT IN NEGLASARI VILLAGE,
SALAWU SUBDISTRICT, TASIKMALAYA REGENCY (1975-2010)*

**Awaludin Nugraha, M. Baiquni, Heddy Shri Ahimsa-Putra, Tri Kuntoro
Priyambodo**

Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana UGM
Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta

e-mail: awaludin.nugraha@unpad.ac.id, mbaiquni@ugm.ac.id,
heddy.shry@ugm.ac.id, mastri@ugm.ac.id

Naskah Diterima: 5 Mei 2018

Naskah Direvisi: 30 Juli 2018

Naskah Disetujui: 10 September 2018

Abstrak

Pada kurun 1975-2010 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pembangunan pariwisata di Kampung Naga dengan tujuan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Namun, masyarakat Kampung Naga melakukan respons negatif terhadap pembangunan tersebut. Mengapa masyarakat Kampung Naga melakukan respons negatif terhadap pembangunan pariwisata, padahal pembangunan tersebut dapat meningkatkan kehidupan ekonominya? Tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk respons masyarakat Kampung Naga terhadap pembangunan pariwisata dan memahami penyebab munculnya respons itu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara sejarah lisan. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk respons negatif masyarakat Kampung Naga terhadap pembangunan pariwisata terjadi secara bertahap dari skala lokal sampai skala nasional. Respons negatif tersebut disebabkan adanya perbedaan pemaknaan terhadap konsep pariwisata. Bagi masyarakat Kampung Naga, pariwisata bermakna silaturahmi yang bertujuan mempererat persaudaraan, sedangkan bagi pemerintah adalah aset untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Kata kunci: pembangunan pariwisata, respons, makna pariwisata, Kampung naga.

Abstract

In the period 1975-2010 Tasikmalaya Regency Government has made tourism development in Kampung Naga. The purpose was to improve the economic life of Kampung Naga community. However, the Kampung Naga community responded negatively to that development. Why did the Kampung Naga community respond negatively to the development of tourism, whereas that development could improve the life of its economist? The purpose of this study is to describe the response form of Kampung Naga community to the tourism development and to understand the cause of the response. The research method used is a historical method, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Collecting data are using literature studiies and oral history interviews. Interactive model is used to analyze data. The result of this study shows that the negative response form of Kampung Naga community toward tourism development happened gradually from local scale to national scale. The response was caused by the difference of the

meaning to the concept of tourism. For the community of Kampung Naga, tourism means a relationship that aims to strengthen the brotherhood, while for the government assets to improve financial benefit.

Keywords: *tourism development, response, meaning of tourism, Kampung naga.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, hasil pembangunannya harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di tempat dilakukannya pembangunan. Untuk itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan itu. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Dalam konteks pariwisata, hal tersebut selaras dengan asas pembangunan pariwisata seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan, harus menjunjung tinggi prinsip norma agama dan nilai budaya. Menurut Goeldner dan Ritchie (2012), penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal di destinasi akan menjadi dasar keberlanjutan pembangunan pariwisata di suatu destinasi. Nilai budaya terdapat dalam adat istiadat yang diusung oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, adat istiadat menjadi kata kunci untuk terlaksananya pembangunan pariwisata.

Jiaying dkk. (2006) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata membutuhkan hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, wisatawan, dan industri pariwisata. Sehubungan dengan itu, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat lokal menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Jiaying dkk. (2006) juga menyatakan bahwa sikap masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata tidak semuanya mendukung. Ada pula yang menolaknya. Di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya bersifat negatif ketika berinteraksi dengan wisatawan, akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan pariwisata.

Oleh karena itu, mempelajari sikap masyarakat lokal dan reaksinya terhadap fenomena kepariwisataan akan membantu pula dalam melakukan proses pembangunan pariwisata.

Implementasi nilai-nilai budaya masyarakat lokal pada pembangunan pariwisata tidak bisa bersifat *top-down*, yaitu dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal, karena akan menghasilkan kegagalan. Jupir (2013) membuktikan hal tersebut di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan pariwisata yang bersifat *top-down* dapat menimbulkan ego sektoral. Pembangunan pariwisata yang bersifat *top-down* juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara, karena keunikan budaya dan kemudahan aksesibilitasnya. Kedatangan wisatawan ke Kampung Naga setidaknya sudah berjalan sejak empat dasawarsa yang lalu dan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak. Banyaknya kunjungan wisatawan itu dilihat oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai potensi besar untuk mendapatkan pemasukan finansial. Seiring dengan kedatangan wisatawan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan pembangunan pariwisata dengan maksud untuk membuat nyaman wisatawan dan semakin meningkatkan jumlah kedatangannya.

Namun, seperti fenomena yang dinyatakan Jiaying dkk. (2006), masyarakat Kampung Naga merespons negatif terhadap pembangunan pariwisata tersebut. Masyarakat Kampung Naga memiliki pandangan lain terhadap

pembangunan pariwisata itu. Mereka merasa tidak nyaman dan terganggu yang akhirnya melakukan respons negatif. Namun begitu, masyarakat Kampung Naga tidak menolak kehadiran wisatawan di kampungnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak menolak aktivitas pariwisata di kampungnya. Namun, mengapa mereka merespons negatif pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah kabupaten? bagaimana bentuk responsnya? dan bagaimana masyarakat Kampung Naga memaknai pariwisata?

Dalam studi ini respons diartikan sebagai reaksi, tanggapan, dan jawaban (Poerwadarminta, 1999). Respons akan timbul setelah seseorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan itu. Respons yang diberikan masyarakat dapat berupa respons positif dan respons negatif. Respons positif muncul bila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif terhadap suatu program/kegiatan, yaitu dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program/kegiatan itu. Sebaliknya, respons negatif muncul bila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi negatif terhadap suatu program/kegiatan, yaitu kurang atau tidak ikut berpartisipasi dalam suatu program/kegiatan atau bahkan menolaknya.

Menurut Doxey (1975, dalam Mowforth dan Munt, 2016), respons masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata dan kegiatan pariwisata akan mengikuti empat tahapan, yaitu *euphoria*, *apathy*, *annoyance*, dan *antagonism*. Arah tahapan tersebut adalah dari menerima dengan senang menuju penentangan. Namun begitu, Doxey pun menyadari bahwa respons tersebut dapat berbeda pada suatu masyarakat karena perbedaan pandangan hidup.

Kajian berkaitan dengan respons masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata sudah banyak dilakukan oleh

para peneliti. Mayoritasnya menggunakan pendekatan kuantitatif, tidak banyak yang menggunakan pendekatan kualitatif. Respons yang dikemukakannya lebih banyak respons positif, ketimbang respons negatif.

Nunkoo dkk. (2013) melakukan studi longitudinal terhadap 140 artikel yang terbit dalam tiga jurnal pariwisata ternama sejak tahun 1984-2010. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan sifat dari artikel dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena tujuan tersebut, maka tidak dikemukakan lokasinya. Sebagian besar dari artikel-artikel itu bersifat deskriptif dan sisanya menguji teori tertentu. Mayoritas penelitian itu menggunakan metode kuantitatif. Tidak banyak yang menggunakan metode kualitatif dan metode campuran. Kajian-kajian tentang topik tersebut dalam tahun-tahun terakhir dilakukan pada beberapa lokasi di dunia, seperti di Spanyol (Vargas-Sanchez dkk., 2011), Taiwan (Lee, 2013), Cina (Cornet, 2015; Lai dan Hitchcock, 2016; Wang, 2016), Malaysia (Rasoolimanesh dkk., 2016), Vietnam (Adongo dkk, 2017), Dubai (Zaidan dan Kovacs, 2017), Kanada (Rockett dan Ramsey, 2016), Andalusia (Almeida-Garcia dkk., 2016), Amerika Serikat (Franzidis dan Yau, 2017), dan Mexico (Monterrubio, 2017). Dalam kajian-kajian tersebut, masyarakat lokal merespons positif pembangunan pariwisata dengan berbagai tingkatan. Latar belakang pendidikan, tempat lahir, waktu tinggal dengan komunitasnya, mata pencaharian dan etnisitas, akan mempengaruhi respons itu (Cornet, 2015). Demikian juga dengan kuatnya persepsi terhadap budayanya dan kuatnya keterikatan dengan tempat tinggalnya (Dai dkk., 2017).

B. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi sejarah yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk respons negatif masyarakat Kampung Naga terhadap pembangunan pariwisata di kampungnya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya pada kurun 1975-2010, serta untuk memahami munculnya respons itu. Untuk itu, dipergunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan S.J., 1957).

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, uraian, visual, dan artefak. Sumber datanya berasal dari para pengkisah dan surat-surat kabar sezaman sebagai sumber primernya, sedangkan sumber sekundernya dari laporan penelitian, buku-buku, dan kajian-kajian relevan lainnya yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan.

Data itu dikumpulkan dengan metode lapangan dan pustaka. Metode lapangan dilakukan dengan teknik wawancara sejarah lisan pada beberapa pengkisah yang tinggal di Kampung Naga dan Desa Neglasari (Dienaputra, 2006; Thompson dan Bornat, 2017). Penelitian lapangan dilakukan pada Agustus 2016-Februari 2017. Metode pustaka dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat di perpustakaan-perpustakaan (Zed, 2008). Analisis datanya menggunakan metode kualitatif interpretatif, yaitu metode kualitatif dengan menekankan pada aspek *hermeneutika* dan *verstehen* (Ratna, 2010). *Hermeneutika* berarti menafsirkan dan *Verstehen* berarti memahami. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif seperti yang dikemukakan Miles dkk. (2014). Model ini terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu (1) mengkondensasi data; (2) menyajikan data; dan (3) menarik kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kampung Naga dan Profil

Secara administratif pemerintahan, Kampung Naga termasuk kedalam wilayah Dusun Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Luas seluruh areal Kampung Naga sekitar 10 ha, sedangkan areal pemukimannya hanya sekitar 1,5 ha.

Kesepuluh hektar itu terdiri atas tiga wilayah, yaitu: (1) *Leuweung Karamat*, yaitu tempat nenek moyang mereka dimakamkan yang berada di bagian barat; (2) Perkampungan tempat mereka hidup dan bercocok tanam, di bagian tengah; (3) *Leuweung Larangan* yang konon merupakan tempat para *dedemit*, di bagian timur. Ketiga wilayah tersebut merupakan representasi kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor (Suganda, 2006).

Di areal pemukiman yang berada di kawasan bersih berdiri 113 bangunan yang terdiri dari 109 *imah* (rumah), *bumi ageung*, *masigit*, *bale patemon*, dan *leuit* (lumbung padi). Jumlah bangunan tersebut tidak boleh ditambah. Tata letak *imah* di Kampung Naga mempertimbangkan peredaran matahari yang dibangun memanjang dari timur ke barat. Bagian depan setiap *imah* berhadap-hadapan, untuk menjaga komunikasi dalam hubungan sosial. Bentuk bangunan dan bahan *imah* sama semuanya dan dicat dengan menggunakan kapur berwarna putih. Perbedaan hanya terletak pada ukurannya. Bangunan *imah* berbentuk panggung dengan bahan terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk.

Berkaitan dengan asal usul masyarakat Kampung Naga, terdapat tiga versi yang berbeda. Pertama, berasal dari keturunan Sembah Dalem Singaparna yang merupakan putra bungsu Raja Galunggung VII, Prabu Rajadipuntang, yang ditugaskan untuk menyelamatkan hegemoni Kerajaan Galunggung dari serangan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kedua, berasal dari keturunan Sembah Dalem Singaparna, seseorang yang ditugaskan oleh Raja Mataram untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Ketiga, berasal dari keturunan prajurit Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Singaparna yang menyerang VOC di Batavia pada abad XVII (Saringendyanti dkk., 2008; Sulistiono, 1997; Haditomo, 1989). Dalam hal asal-usul tersebut, masyarakat Kampung Naga hanya mengakui bahwa leluhur mereka adalah Sembah Dalem Singaparna. Sejarah dan

riwayat leluhur Kampung Naga disampaikan *kuncén* secara lisan kepada sesepuh Kampung Naga pada upacara *pedharan* yang dilaksanakan setiap delapan tahun sekali pada saat tengah malam di bulan Mulud.

Dewasa ini keturunan Sembah Dalem Singaparna telah bertambah banyak. Mereka bermukim di dalam Kampung Naga dan di luar Kampung Naga. Keturunan yang tinggal di luar Kampung Naga, terutama tersebar di Kecamatan Salawu dan Kecamatan Cigalontang. Jumlah mereka diperkirakan sembilan kali dari jumlah yang bermukim di dalam Kampung Naga. Mereka yang tinggal di luar Kampung Naga dianggap sebagai *seuweu-siwi* (keturunan) Naga dalam kesatuan masyarakat *Sanaga*. Mereka juga menjalankan “*talari paranti para karuhun*” (adat istiadat para leluhur). Umumnya mereka bermatapencaharian utama di sektor pertanian. Selain itu, mereka juga bekerja sampingan sebagai pengerajin, pemandu wisata, pedagang, pegawai, buruh, dan peternak.

Tingkat pendidikan kepala keluarga di Kampung Naga hanya mengenyam pendidikan formal sampai tamat sekolah dasar. Namun kesadaran masyarakat Kampung Naga untuk menempuh pendidikan sangat tinggi. Akan tetapi, karena sarana dan prasarannya tidak tersedia, maka mereka harus bersekolah di luar kampungnya atau menjadi *Sanaga*. Tingginya kesadaran untuk menempuh pendidikan tersebut nampak dari *pikukuh* “*bodo alewoh*”, yang bermakna bahwa mereka merasa bodoh, karena itu selalu bertanya dan selalu ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Kampung Naga dan *Sanaga* mencari ilmu pengetahuan tidak hanya dari pendidikan formal. *Pikukuh* mereka mengajarkan bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dapat melalui tiga hal, yaitu *Luang*, *Daluang*, dan *Uang*. *Luang* adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari petuah dan ucapan lisan yang pernah didapatkan dari orang tua atau sesepuh

serta dari pengalaman di kehidupan sehari-hari. *Daluang* adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku, kitab suci, atau bacaan lainnya. *Uang* adalah mendapatkan ilmu pengetahuan melalui penggunaan uang, yaitu dengan menempuh pendidikan formal untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya dan untuk itu harus membayar dengan menggunakan uang atau materi lainnya.

Masyarakat Kampung Naga diatur dengan suatu sistem pemerintahan sendiri yang khas. Untuk yang berhubungan dengan kenegaraan, mereka akan tunduk dan taat pada RT, RW, Kepala Dusun, dan Kepala Desa. Namun untuk yang berhubungan dengan adat istiadat, mereka akan tunduk dan taat pada *Kuncén*, *Punduh*, dan *Lebé*. *Kuncén* yang pada saat ini dijabat oleh Bapak Ade Suherlin, merupakan orang yang dituakan dan merupakan pemangku adat yang menjaga, melaksanakan, dan memimpin acara-acara adat yang berjalan secara turun temurun, sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat. *Lebé* yang dijabat oleh Bapak Henhen, bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu, “*ngurus mayit ti awal dugi ka ngurebkeun*” (mengurus jenazah dari mulai memandikan, menyolatkan, dan memakamkannya). Selain itu, ia juga bertugas menjadi pemimpin doa dalam setiap acara ritual di Kampung Naga. *Punduh* yang dijabat oleh Bapak Maun, bertugas sebagai penghubung antara *kuncén* dengan masyarakat dan pemerintah desa. Ia juga sebagai penggerak aktivitas masyarakat dalam kegiatan di kampungnya, seperti gotong royong membangun dan memelihara prasarana. Selain itu, ia juga bertugas untuk “*ngurus laku méré gawé*”, yang berarti mengayomi warga dan mencermati tingkah laku masyarakat agar selalu taat menjalankan ketentuan adat dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, masyarakat Kampung Naga mendasarkan pada tiga tuntunan hidup

yang diajarkan dan diwariskan oleh leluhurnya. Ketiga tuntunan hidup itu adalah *Papagon Hirup*, *Pamali*, dan *Patilasan*. Untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan tuntunan hidup tersebut dilakukan upacara-upacara ritual.

Upacara ritual yang sangat penting adalah berpantang memperbincangkan mengenai adat istiadat dan asal usul masyarakat Kampung Naga, baik antar sesama anggota masyarakatnya, apalagi dengan wisatawan. Ritual ini dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Ritual tersebut sangat dihormati, sehingga upacara atau kegiatan apapun tidak boleh dilaksanakan ketika ritual tersebut sedang berlangsung.

Ritual penting lainnya yang dengan taat dijalankan masyarakat Kampung Naga adalah *hajat sasih* dan *pedharan*. *Hajat sasih* dilaksanakan enam kali dalam setahun, yaitu pada bulan Muharam, Mulud, Jumadil Akhir, Rewah, Sawal, dan Rayagung. Upacara tersebut dilakukan satu hari pada bulan-bulan itu. Upacara *hajat sasih* diikuti oleh semua keturunan Kampung Naga, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Kampung Naga. Salah satu tujuannya adalah untuk menghormati *karuhun* dengan melakukan ziarah serta membersihkan makam dan peninggalannya. Upacara *pedharan* dilaksanakan setiap satu windu pada saat bulan purnama.

2. Pembangunan Pariwisata dan Respons Masyarakat Kampung Naga

Kampung Naga dengan keunikan dan kemudahan aksesibilitasnya banyak dikunjungi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Namun, belum diketahui dengan pasti sejak kapan Kampung Naga mulai dikunjungi wisatawan. Sejauh penelusuran terhadap majalah pariwisata, buku petunjuk perjalanan wisata, dan laporan pemerintah yang terbit pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, tidak ditemukan informasi tentang Kampung Naga. Dengan demikian, maka patut diduga bahwa pada masa Pemerintahan

Hindia Belanda, Kampung Naga belum menjadi objek wisata, atau paling tidak, belum menjadi objek wisata yang ditawarkan. Kampung Naga hanya merupakan kampung biasa dengan jumlah penduduk yang sedikit, tidak bergejolak, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian Pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak ada catatan pada Pemerintah Hindia Belanda.

Sementara menurut salah satu pengkisah, Kampung Naga mulai banyak dikunjungi wisatawan sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1976 pemerintah daerah merencanakan untuk membangun penginapan di Kampung Naga, tetapi rencana tersebut ditolak masyarakat Kampung Naga. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kampung Naga semakin meningkat. Pada tahun 2014 wisatawan yang mengunjungi Kampung Naga telah berjumlah 91.982 orang, dengan rincian 3.404 wisatawan mancanegara dan 88.578 wisatawan Nusantara (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, 2016).

Pemerintah kabupaten melihat bahwa besarnya potensi wisata yang dimiliki Kampung Naga merupakan aset potensial untuk dikembangkan yang dapat mendatangkan pendapatan asli daerah dan juga peningkatan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Pemerintah kabupaten lalu mempromosikannya dan bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kampung Naga akan manfaat positif adanya aktivitas pariwisata di kampungnya. Dalam penyuluhan itu masyarakat diberikan pengertian bahwa kedatangan wisatawan itu akan meningkatkan penghasilan mereka melalui penjualan kerajinan tangan, membuka warung makanan, dan menjadi pemandu wisatawan.

Untuk mendukung kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke Kampung Naga, pemerintah kabupaten membangun prasarana dan sarana parkir serta toko cinderamata di dekat Kampung Naga.

Tanahnya dibeli dari penduduk setempat bernama H. Syarif seluas 2.520 m² pada tahun 1992 (Mudzakkir, 2012). Pemerintah kabupaten kemudian memungut retribusi parkir dari kendaraan wisatawan yang masuk dengan besaran yang tidak ditentukan.

Pembangunan lahan parkir dan pungutan retribusi parkir tersebut tidak disukai oleh masyarakat Kampung Naga. Namun ketidaksukaan tersebut tidak diungkapkan dalam bentuk perlawanan. Hal itu disebabkan pungutan retribusi parkir itu tidak ditentukan besarnya, sehingga dipandang sebagai bentuk saling menguntungkan dan saling memahami karena tidak ada unsur paksaan.

Pada tahun 2002, pemerintah kabupaten membangun sebuah bangunan pos untuk menarik retribusi dari wisatawan yang berkunjung ke Kampung Naga. Selain itu dibangun pula papan petunjuk yang bertuliskan “Objek Wisata Kampung Naga” dan “Selamat Datang di Kampung Naga, *Welcome to Kampung Naga*”. Pungutan retribusi tersebut dianggap oleh masyarakat Kampung Naga sebagai komersialisasi kampungnya oleh pemerintah kabupaten. Dengan dipimpin oleh kuncen barunya yang dipilih tahun 2001, Ade Suherlin, masyarakat Kampung Naga melakukan penolakan dengan melakukan aksi pembakaran pos retribusi dan penghancuran papan petunjuk yang bertuliskan “Objek Wisata Kampung Naga”. Akibat dari aksi tersebut, pungutan retribusi kepada wisatawan dihapuskan oleh pemerintah kabupaten.

Penolakan masyarakat Kampung Naga terhadap pungutan retribusi itu disebabkan kebijakan itu bertentangan dengan *pikukuh*-nya. *Pikukuh* masyarakat Kampung Naga mewajibkan semua anggotanya untuk menghormati tamu, sehingga ketika tamunya harus membayar melalui retribusi untuk dapat berkunjung ke kampungnya, maka hal tersebut sama dengan tidak menghormati tamu itu. Selain bertentangan dengan *pikukuh*-nya, masyarakat Kampung Naga juga merasa

dicemarkan nama baiknya oleh kebijakan itu. Pengunjung tidak akan melihat bahwa pungutan itu merupakan kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi akan menuding kepada masyarakat Kampung Naga bahwa mereka telah mengkomersialisasikan kampung dan adat istiadatnya.

Insiden penolakan tersebut tidak menyurutkan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembangunan pariwisata di Kampung Naga. Pada tahun 2003 pemerintah kabupaten melakukan penembakan anak tangga menuju Kampung Naga. Kemudian tahun 2005 keluar Perda No. 2 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perda tersebut Kampung Naga dimasukkan sebagai kawasan wisata budaya. Perda itu disusul dengan Perda No.4 tahun 2005 tentang Retribusi Lahan Parkir di Kampung Naga. Mengacu pada perda tersebut pemerintah kabupaten memungut retribusi parkir dari kendaraan wisatawan dengan menentukan besarnya, yaitu bus Rp 45.000; mikrobus Rp 30.000; minibus (sekelas Toyota Kijang), Rp 18.000; minibus (sekelas Suzuki Carry) Rp 12.000; jip Rp 6.000; dan sepeda motor Rp 2.400 (*Kompas*, 1 Februari 2006; Suganda, 2009). Besaran retribusi parkir tersebut banyak diprotes oleh pengunjung, karena sangat memberatkan mereka. Para pengunjung ada yang menganggap bahwa masyarakat Kampung Naga telah mengkomersialkan adatnya. Anggapan tersebut dibantah oleh masyarakat Kampung Naga, karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan tidak pernah mendapatkan bagian dari retribusi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Naga merasa dipermalukan oleh pemerintah kabupaten.

Melihat gejala yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Kampung Naga, otoritas adat dan sesepuh Kampung Naga kemudian menutup Kampung Naga dari kedatangan semua pengunjung pada 6 Februari 2006.

Penutupan tersebut diumumkan oleh kuncén ke media massa dengan alasan Kampung Naga telah dijadikan objek oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan pemasukan bagi kas pemerintah kabupaten melalui pungutan retribusi parkir (*Kompas*, 1 Februari 2006). Mereka merasa telah dikomersialkan oleh pemerintah kabupaten, padahal mereka bukan aset pemerintah kabupaten. Mereka merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya oleh pemerintah kabupaten. Bahkan, mereka merasa seperti penghuni kebun binatang yang ditonton oleh pengunjung (*Kompas*, 1 Februari 2006; *Pikiran Rakyat*, 6 Februari 2006).

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membenarkan penutupan Kampung Naga tersebut, tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang akan melakukan penelitian (*Kompas*, 1 Februari 2006; *Koran Tempo*, 3 Februari 2006). Akan tetapi, beberapa hari sejak Kampung Naga ditutup bagi pengunjung, sebuah media menyatakan bahwa sudah 16 wisatawan ditolak masuk Kampung Naga (*Liputan 6.com*, 10 Februari 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kampung Naga tidak menerima kunjungan untuk semua pengunjung, tidak hanya para peneliti seperti yang dikatakan pihak pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggap bahwa upaya pembangunan pariwisata di Kampung Naga telah dihambat oleh aturan adatnya. Bagi pemerintah kabupaten, Kampung Naga adalah aset wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat mendatangkan pendapatan asli daerah, terutama dari wisatawan mancanegara (*Kompas*, 13 Maret 2006). Oleh karena itu, penutupan tersebut cepat direspons oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan pemerintah kabupaten dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat Kampung Naga pada 9 Februari 2006. Pada Maret 2006 pembicaraan tersebut berhasil mencapai kata sepakat dengan akan diubahnya Perda No.4 tahun 2005 dan pemerintah kabupaten merespons usul

masyarakat Kampung Naga untuk membentuk *Saung Budaya* (*Koran Tempo*, 28 Maret 2006). Perda itu kemudian direvisi menjadi Perda No.16 tahun 2006 tentang Retribusi Lahan Parkir.

Pada tahun 2009, konflik antara masyarakat Kampung Naga dengan pemerintah kabupaten kembali terjadi. Pemicunya adalah kenaikan harga minyak tanah akibat diberlakukannya kebijakan peralihan minyak tanah ke gas. Kebijakan tersebut mengakibatkan harga minyak tanah menjadi mahal, sampai mencapai Rp 10.000,00 per liter di Kampung Naga. Oleh masyarakat Kampung Naga, minyak tanah dipergunakan untuk penerangan, tidak untuk memasak. Untuk memasak mereka menggunakan kayu bakar. Masyarakat Kampung Naga tidak dapat menerima peralihan minyak tanah ke gas itu, karena mereka tidak dapat menggunakan gas untuk penerangan. Akibatnya penerangan di rumah-rumah sangat terganggu. Ketika itu di Kampung Naga *poek mongkleng* (gelap gulita), begitu penuturan pengkisah.

Harga minyak tanah yang semakin tidak terjangkau dan pengelolaan parkir yang tidak melibatkan masyarakat, telah melukai masyarakat Kampung Naga. Mereka merasa bahwa pemerintah telah bersikap tidak adil dan tidak memperhatikan mereka, padahal mereka selalu patuh pada pemerintah. Selain itu, mereka juga merasa bahwa pemerintah tidak mendukung apa yang sudah mereka lakukan, yaitu menjaga dan melestarikan adat leluhur, tetapi pemerintah justru memaksa untuk menggunakan bahan bakar gas. Menurut Kuncén, bahan bakar gas dan kompor gas merupakan benda modernisasi yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelestarian budaya dan adat Kampung Naga. Oleh karena itu, pada 14 Mei 2009 masyarakat Kampung Naga menutup kembali kampungnya dari kedatangan pengunjung (*Pikiran Rakyat*, 18 Mei 2009).

Penutupan tersebut mengundang reaksi, baik dari pemerintah kabupaten,

pemerintah provinsi, apalagi wisatawan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyayangkan penutupan tersebut. Ia menganggap bahwa penutupan tersebut akan mengganggu dunia pariwisata Jawa Barat dan juga akan memberikan citra negatif terhadap pariwisata di Jawa Barat. Padahal Kampung Naga mempunyai potensi menarik sebagai objek wisata dan mampu menarik wisatawan, karena itu harus terus dilestarikan (*Pikiran Rakyat*, 18 Mei 2009).

Oleh karena Kampung Naga merupakan aset bagi pemerintah, maka pemerintah kabupaten dan provinsi berusaha menyelesaikan masalah mahal dan langkanya minyak tanah yang dialami masyarakat Kampung Naga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan teknologi *solarcell* untuk memenuhi kebutuhan energi bagi penerangan, tetapi ditolak masyarakat Kampung Naga (*Pikiran Rakyat*, 18 Mei 2009). Bupati Kabupaten Tasikmalaya akhirnya memberikan subsidi minyak tanah bagi masyarakat Kampung Naga sebesar Rp 2.900,00/liter, dengan jumlah 5.000 liter/3 bulan dan distribusinya dilakukan oleh koperasi. Namun karena masyarakat Kampung Naga belum mempunyai koperasi, maka untuk sementara Kapolwil Priangan Timur mengkoordinasikan distribusi tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diperjuangkannya, maka pada sekitar pertengahan September 2009 Kampung Naga dibuka kembali bagi wisatawan.

Pada awal tahun 2010 berdiri koperasi yang disyaratkan untuk mendistribusikan minyak tanah dengan nama Koperasi Warga Sauyunan. Fungsi koperasi tersebut adalah mendistribusikan minyak tanah subsidi dan mengelola lahan parkir. Koperasi tersebut harus menyetorkan uang kontrak lahan parkir sebesar Rp 12 juta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dan Rp 3 juta kepada Desa Neglasari (Mudzakir, 2010) Selain itu, koperasi tersebut juga berfungsi untuk mengelola sektor pariwisata yang

bersinergi dengan HIPANA (Himpunan Pramuwisata Kampung Naga), yang telah lebih dulu berdiri. HIPANA didirikan untuk melayani pengunjung, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari kehadiran pengunjung, serta menjaga etika, adat, dan budaya Kampung Naga dari pelanggaran yang dilakukan pengunjung.

3. Makna Pariwisata Menurut Masyarakat Kampung Naga

Pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 1970-an sampai dasawarsa pertama abad ke-21 ternyata tidak direspons positif oleh masyarakat Kampung Naga. Hal tersebut nampak dari empat kejadian konflik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat Kampung Naga yang muncul ke permukaan pada kurun waktu tersebut (1976, 2002, 2006, 2009). Pembangunan pariwisata yang dijalankan lebih bersifat perintah (*top-down*) dan sesuai dengan persepsi pemerintah kabupaten (Scott, 1998). Masyarakat Kampung Naga sebagai “pemilik” lokasi tidak dilibatkan sejak perencanaan sampai pelaksanaannya. Dalam pembangunan pariwisata di Kampung Naga, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggunakan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial sebanyak mungkin dari wisatawan. Agar kedatangan wisatawan semakin banyak jumlahnya dan mau berkunjung kembali, maka wisatawan harus diberikan kemudahan dan kenyamanan, sehingga wisatawan senang mengunjunginya dan mau mengeluarkan uang yang banyak. Melalui uang yang masuk dari wisatawan itu, masyarakat lokal akan dapat meningkatkan pendapatannya. Demikian juga bagi pemerintah lokal dapat meningkatkan pendapatan daerahnya (Telfer dan Sharpley).

Masyarakat Kampung Naga tidak menolak peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan pariwisata. Mereka melakukan respons negatif

terhadap pembangunan pariwisata itu karena menginginkan dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Mereka menginginkan pembangunan itu selaras dengan kebiasaan, adat istiadat, dan normanya, supaya mereka dapat hidup nyaman di kampungnya. Keinginan menjadi subjek pembangunan itu dikemukakan oleh Kuncén Kampung Naga, Ade Suherlin, kepada wartawan Kompas bahwa seharusnya pemerintah mengerti adat istiadat itu bukan milik pemerintah, tetapi milik keturunan masyarakat Kampung Naga. Hal tersebut sama dengan prinsip agama bahwa agama merupakan milik umat yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun (*Kompas*, 13 Maret 2006). Pernyataan Kuncén tersebut dapat dimaknai bahwa adat istiadat dapat disamakan dengan agama yang harus dipegang teguh, dibela, dan dilaksanakan oleh penganutnya, serta tidak boleh diganggu oleh siapa pun juga.

Dalam hal pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah kabupaten, seharusnya pembangunan itu selaras dengan adat istiadat masyarakat Kampung Naga. Apabila pembangunan pariwisata itu tidak sesuai dengan adat istiadatnya, maka pemerintah telah mengganggu kehidupannya dan tidak menghormatinya. Dengan begitu, maka pemerintah bukan lagi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Kampung Naga yang harus dihormati dan diikuti, seperti yang tersirat dalam *pikukuh*-nya, “*pamaréntah lain lawaneun tapi kawulaaneun*”, yang artinya bahwa pemerintah itu bukan untuk dilawan tetapi untuk diabdikan, sehingga masyarakat harus patuh kepada pemerintah. *Pikukuh* itu tidak berlaku manakala pemerintah sudah bertindak sewenang-wenang dan mengganggu adat istiadat serta kehidupannya. Masyarakat Kampung Naga akan membela diri dari pihak-pihak yang mengganggu dan mencampuri adat istiadat dan kehidupannya, termasuk pemerintah.

Pembelaan diri terhadap kesewenangan yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui pembangunan

pariwisata itu dilakukan masyarakat Kampung Naga selama empat kali, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan kualitas yang meningkat dan semakin efisien. Perlawanan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata adalah ditutupnya Kampung Naga dari kunjungan wisatawan tahun 2006 dan 2009. Penutupan pada tahun 2006 masih memberi peluang bagi wisatawan perorangan, tetapi pada tahun 2009 semua pengunjung dengan kepentingan apapun tidak dizinkan berkunjung.

Penutupan Kampung Naga dari kedatangan wisatawan tidak berarti bahwa masyarakatnya anti terhadap wisatawan. Bagi mereka, wisatawan adalah tamu yang menurut adat istiadatnya wajib dihormati. Tamu harus *ditata* dan *dijamu*, artinya tamu harus diperlakukan dengan baik dan disenangkan hatinya. Dengan demikian, tamu akan selalu ingat kepada budi baik tuan rumah, sehingga ada kesan indah yang tidak bisa dilupakan oleh sang tamu. Kewajiban masyarakat Kampung Naga untuk menghormati tamunya nampak dalam perumpamaan yang menjadi *pikukuh*-nya, “*upami téa mah katamuan, héng urang keur digawé boh di sawah boh di kebon, upami kantun sapacokeun deui, aya nu nyusulan wiréh aya tamu, tibatan ngaanggeuskeun anu sapacokeun deui kajeun tinggalkeun pacul mah di dinya, tuturkeun anu néang bilih aya kapentingan nanaon, ulah rék aral ulah rék subaha ulah rék melang kana paculeun*”, yang artinya, bila sedang mengerjakan sesuatu, baik di sawah atau di kebun, lalu ada seseorang yang memberitahukan bahwa ada tamu yang berkunjung, maka harus segera meninggalkan pekerjaan itu, jangan menyelesaikan pekerjaan itu meskipun pekerjaan itu tinggal sedikit lagi tuntas, lalu segera menemui tamu itu, dan jangan menyesali serta jangan khawatir dengan pekerjaan yang belum dituntaskan itu.

Dalam *pikukuh* tersebut terkandung pesan bahwa meskipun tamu itu wajib dihormati, tetapi tamu juga harus ingat

bahwa ia (mereka) sedang berkunjung ke orang lain yang memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan norma sendiri, yang mungkin berbeda dengan dirinya. Oleh karena itu, tamu juga harus menghormati tuan rumah dengan mengikuti kebiasaan, adat istiadat, dan normanya. Tamu tidak sepatutnya mengobrol kemauannya sendiri di tempat yang dikunjungi. Tamu berkewajiban juga untuk menyenangkan tuan rumah melalui penghormatan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan normanya. Penghormatan terhadap tuan rumah itu dilakukan melalui tutur kata, bahasa tubuh, dan tingkah laku yang dapat menyenangkan tuan rumah. Hal tersebut harus dilakukan oleh tamu untuk mengimbangi tuan rumah yang telah mengorbankan segalanya untuk menghormati tamunya.

Jadi berdasarkan *pikukuh* tersebut faktor keseimbangan dalam hubungan antara tamu dengan tuan rumah sangat dikedepankan. Di satu pihak tuan rumah tidak boleh memperlakukan tamunya dengan semena-mena, tetapi juga tidak perlu menghormatinya dengan berlebihan. Tuan rumah menghormati tamu sesuai dengan kemampuannya, tetapi kemampuan terbaiknya. Di lain pihak, tamu yang berkunjung tidak boleh mengobrol kemauannya dan tidak perlu melakukan penghormatan yang berlebihan pula. Tamu juga tidak sepatutnya menunjukkan kelebihan akan penguasaan materi serta kedudukan sosialnya kepada tuan rumah, serta tidak sepatutnya juga menunjukkan ego kulturalnya. Apalagi dengan melakukan pemaksaan supaya tuan rumah menghormati dirinya.

Berdasarkan *pikukuh* terhadap tamu tersebut, masyarakat Kampung Naga memaknai kunjungan wisatawan ke daerahnya, sebagai orang atau sekelompok orang yang sedang melakukan *saba budaya*. *Saba budaya* dimaknainya sebagai kunjungan untuk ber-*silaturahmi* ke Kampung Naga. *Silaturahmi* dimaknai sebagai saling berkasih sayang berdasar hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Konsekuensi dari *silaturahmi* adalah saling

mengingat, saling membantu, dan saling memaafkan.

Kata *saba*, dalam bahasa Sunda diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya sehari-hari ke suatu tempat tertentu yang dianggap menyenangkan atau ke tempat yang dianggap perlu. Tempat yang dikunjungi itu cukup jauh dari tempat tinggal sehari-harinya, sehingga untuk mencapai tempat itu ia harus mengorbankan materi, waktu, dan tenaganya. Setelah selesai dengan urusan di tempat yang dikunjungi, ia akan kembali ke tempat tinggal sehari-harinya. Jadi ia tidak menetap di tempat yang dikunjungi. Dengan begitu, maka makna kata *saba* adalah suatu perjalanan yang dimulai dan kembali pada titik yang sama. Makna tersebut selaras dengan makna kata *tour* yang dikemukakan McCabe (2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka *saba budaya* dimaknai sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya sehari-hari untuk mengunjungi keluarga dalam rangka memperkuat hubungan kasih sayang, lalu setelah menyelesaikan urusannya akan kembali ke tempat tinggal sehari-harinya. Berdasarkan makna tersebut, masyarakat Kampung Naga menempatkan wisatawan yang berkunjung ke kampungnya sebagai keluarganya, bukan orang asing. Hubungan sosial yang dijalinnya adalah hubungan kekeluargaan. Wisatawan yang mengunjunginya dianggap sebagai saudara kandung yang sedang pulang kampung. Sebagaimana layaknya saudara kandung yang sedang pulang kampung, wisatawan diperlakukan dengan baik sebagai saudara kandung. Interaksi sosial yang dibangunnya berlandaskan kasih sayang sebagai saudara kandung. Begitu juga penghormatan yang dilakukan seperti layaknya penghormatan kepada saudara kandung yang dilandasi oleh rasa kasih sayang.

Dengan landasan kasih sayang

dalam proses sosialnya itu, masyarakat Kampung Naga menginginkan adanya hubungan timbal balik yang sama dari wisatawan yang berkunjung ke kampungnya. Wisatawan diharapkan untuk menghormati masyarakat Kampung Naga dengan landasan kasih sayang. Oleh karena itu, ketika wisatawan berkunjung ke Kampung Naga, mereka tidak mengobrol kemauannya serta menjaga tata laku dan bahasanya supaya tidak menyinggung saudaranya, yaitu masyarakat Kampung Naga. Apalagi mereka akan mengunjungi sesepuh yang menurut adat orang Timur harus dihormati.

Oleh karena wisatawan dianggap sebagai keluarganya, maka masyarakat Kampung Naga menjadi marah ketika pemerintah kabupaten menerapkan kebijakan retribusi masuk ke Kampung Naga. Hal tersebut sama halnya dengan saudara kandung yang akan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dihalangi dan harus membayar. Begitu juga ketika ada keluhan dari pengunjung karena mahalannya retribusi parkir, masyarakat Kampung Naga menjadi marah juga. Alasan kemarahannya tidak berbeda dengan argumen retribusi masuk.

Pada penyelesaian perlawanan tahun 2006, sesepuh masyarakat Kampung Naga menyampaikan keinginan untuk menjadikan kampungnya sebagai *saung budaya* kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (*Koran Tempo*, 28 Maret 2006). *Saung budaya* diartikan sebagai rumah atau tempat pelestarian budaya. Pelestarian berasal dari kata dasar “lestari”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang semula atau tidak berubah atau kekal, sedangkan kata “pelestarian” berarti perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi. Sebagai tempat pelestarian budaya berarti Kampung Naga merupakan tempat untuk melindungi budaya dari kemusnahan atau kerusakan.

Konsep *saung budaya* tersebut disampaikan karena Kampung Naga

telah dijadikan objek wisata oleh pemerintah kabupaten. Masyarakat Kampung Naga menolak kampungnya dijadikan objek wisata, karena menurut pemahamannya objek wisata adalah tempat untuk melakukan aktivitas piknik dan bersenang-senang sesuka hati. Padahal mereka menganggap bahwa kampungnya adalah tanah yang suci, sehingga orang-orang yang tinggal dan ada di dalamnya harus menjaga kesuciannya. Masyarakat Kampung Naga meyakini bahwa bila kampungnya dijadikan objek wisata, maka kesuciannya akan ternoda dan mereka akan menerima akibat buruk yang tidak diinginkannya. Selain itu, bila menjadi objek wisata, kampungnya seolah-olah seperti kebun binatang atau museum yang ditonton oleh pengunjung. Mereka tidak menginginkan dijadikan sebagai objek tontonan.

Masyarakat Kampung Naga menjaga kesucian kampungnya dengan tiga tuntunan hidup yang diajarkan dan diwariskan oleh leluhurnya, yaitu *papagon hirup*, *pamali*, dan *patilasan*. Pertama, *papagon hirup*, yaitu ajaran berupa pegangan hidup yang harus dijalankan dan bersifat perintah. *Papagon hirup* yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Naga adalah *wasiat*, *amanat*, dan *akibat*. *Wasiat* adalah warisan berupa pesan-pesan yang menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan. Pesan-pesan itu merupakan pandangan dunia yang merefleksikan akan tujuan terbentuknya tata kehidupan di masa kini dan masa depan yang selaras dengan lingkungan alam, karena di dalamnya terkandung hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk yang merupakan bagian dari alam semesta. *Amanat* mengemukakan tentang *pitutur* atau wejangan dari *karuhun* yang pada intinya berupa hidup sederhana, menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian, serta upacara ritual. *Akibat* adalah konsekuensi yang akan diterima bila melanggar dan tidak menjaga *wasiat* dan *amanat*. *Akibat* memiliki nilai spiritual

tinggi yang sama dengan larangan agama, meskipun sangsinya tidak nampak tetapi dirasakan oleh pelakunya sebagai beban yang menyiksa batin.

Kedua, *pamali*, yaitu bentuk ajaran untuk meninggalkan sesuatu, baik yang bersifat ucapan maupun tindakan. *Pamali* biasa juga disebut tabu. *Pamali* selalu ditanamkan dalam hati dan pikiran masyarakat Kampung Naga, sehingga menjadi penjaga dalam bertutur dan berperilaku. Melalui *pamali* itu, mereka memiliki kontrol terhadap perilaku bermasyarakat beserta ekosistemnya.

Ketiga, *patilasan*, yaitu sarana untuk mengingat jasa para leluhurnya. *Patilasan* adalah ruang suci untuk menunjukkan bukti bahwa *karuhun* mereka memang benar-benar ada. *Patilasan* sangat dijaga keberadaannya oleh masyarakat Kampung Naga, terutama dari sentuhan wisatawan yang datang ke kampungnya, serta dirawat melalui upacara *pedharan* dan *hajat sasih*.

D. PENUTUP

Pembangunan pariwisata yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan penghidupan ekonomi masyarakat harus diselaraskan dengan adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Apabila tidak, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dan bahkan memunculkan respons negatif. Pembangunan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Naga direspons negatif oleh masyarakatnya dalam bentuk perlawanan terbuka. Skala perlawanannya dimulai dari yang berdampak lokal sampai yang berdampak nasional. Respons negatif itu muncul karena pembangunan pariwisata yang dilakukan di Kampung Naga tidak berdasarkan pada adat istiadat dan norma yang berlaku pada masyarakatnya.

Tidak diperhatikannya adat istiadat dan norma masyarakat Kampung Naga sebagai dasar pembangunan pariwisata disebabkan adanya perbedaan pemaknaan terhadap konsep pariwisata. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memaknai

pariwisata di Kampung Naga dengan pendekatan ekonomi, yaitu sebagai aset untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dengan pendekatan tersebut, interaksi sosial yang dibangunnya pun adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sementara masyarakat Kampung Naga memaknai pariwisata dengan pendekatan *silaturahmi*, yaitu untuk menjalin persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga interaksi sosial yang dibangunnya pun adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan.

Pembangunan pariwisata di Kampung Naga seyogyanya menggunakan pendekatan *silaturahmi*. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat Kampung Naga dapat tetap menjalankan adat istiadatnya dan dapat meneruskannya pada generasi penerusnya, tanpa ada gangguan dari pihak luar. Dengan pendekatan itu pula wisatawan dapat lebih menikmati keunikan Kampung Naga dan dapat mempelajari kearifan lokalnya yang mungkin dapat berguna bagi kehidupannya. Pendekatan *silaturahmi* juga dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran yang diajukan, yaitu: (1) masyarakat yang tetap mempertahankan adat istiadatnya seyogyanya tidak dilihat sebagai hambatan untuk melakukan pembangunan, tetapi dilihat sebagai potensi untuk merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya; (2) pembangunan pariwisata yang dilakukan pihak berwenang seyogyanya beralih dari pendekatan pertumbuhan ekonomi ke pendekatan pariwisata berkelanjutan yang ditunjang oleh sistem sosial-budaya masyarakatnya, karena pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kuncen Kampung Naga yang telah mengizinkan

kami untuk melakukan wawancara dan pengamatan di Kampung Naga. Juga kepada segenap masyarakat Kampung Naga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Neglasari atas kesempatan wawancara dan kemudahan yang diberikan ketika proses pengumpulan data di lapangan.

DAFTAR SUMBER

1. Jurnal dan Laporan Penelitian

- Adongo, Raymond, Ja Young Choe, Hagchin Han. "Tourism in Hoi An, Vietnam: Impacts, Perceived Benefits, Community Attachment and Support for Tourism Development" dalam *International Journal of Tourism Sciences*. March 2017. Hlm.1-21. DOI: 10.1080/15980634.2017.1294344.
- Almeida-Garcia, F., Maria Angeles Pelaez-Fernandez, Antonia Balbuena-Vasquez, Rafael Cortes-Macias. "Resident's Perceptions of Tourism Development in Banalmadena, Spain" dalam *Tourism Management* Vol. 54. 2016. Hlm. 259-274.
- Cornet, Candice. "Tourism Development and Resistance in China" dalam *Annals of Tourism Research* Vol.52. 2015. Hlm.29-43.
- Dai, Linlin, Siyu Wang, Jun Xu, Li Wan, Bihu Wu. "Qualitative Analysis of Residents' Perceptions of Tourism Impacts of Historic Districts: A Case Study of Nanluoguxiang in Beijing, China" dalam *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* Vol.16 No.1 January 2017. Hlm.107-114.
- Franzidis, Alexia dan Michael Yau. "Exploring the Differences in a Community's Perception of Tourists and Tourism Development" dalam *Tourism Planning & Development*. June 2017. Hlm. 1-16. DOI: 10.1080/21568316.2017.1338199.
- Haditomo. 1989.
Sistem Sosial Kampung Naga. Laporan Penelitian. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Jiaying, Zhang, Robert J. Inbakaran, Mervyn S. Jackson. "Understanding Community Attitudes Towards Tourism and Host-Guest Interaction in the Urban-Rural Border Region" dalam *Tourism Geographies* Vol.8 No.2. May 2006. Hlm. 182-204.
- Jupir, M. Maris. "Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat) dalam *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* Vol.1 No.1. Januari 2013. Hlm.28-37.
- Lai, Ivan Ka Wai dan M. Hitchcock. "Local Reactions to Mass Tourism and Community Tourism Development in Macau" dalam *Journal of Sustainable Tourism*. November 2016. Hlm.1-20. DOI: 10.1080/09669582.2016.1221413.
- Lee, Tsung Hung. "Influence Analysis of Community Resident Support for Sustainable Tourism Development" dalam *Tourism Management* Vol.34. 2013. Hlm.37-46.
- Monterrubio, Carlos. "Protests and Tourism Crises: A Social Movement Approach to Causality" dalam *Tourism Management Perspectives* Vol.22. 2017. Hlm.82-89.
- Mudzakkir, Amin. "Antara Masyarakat Adat dan Umat: Masyarakat Kampung Naga dalam Perubahan" dalam *Jurnal Institut MAARIF* Vol.7 No.1. 2012. Hlm.104-116.
- Nunkoo, Robin, et.al. "Resident's Attitudes to Tourism: A Longitudinal Study of 140 Articles from 1984-2010" dalam *Journal of Sustainable Tourism* Vol.21 No.1. 2013. Hlm.5-25.
- Rasoolimanesh, S. Mostafa, Jose L. Roldan, Mastura Jaafar, T. Ramayah . "Factors Influencing Residents Perceptions toward Tourism Development: Differences Accross Rural and Urban World Heritage Sites" dalam *Journal of Travel Tourism*. 2016. Hlm. 1-16. DOI: 10.1177/0047287516662354.
- Rockett, Jennifer dan Doug Ramsey. "Resident Perceptions of Rural Tourism Development: the Case of Fogo Island and Change Islands, Newfoundland, Canada" dalam *Journal of Tourism and Cultural Change*. March 2016. Hlm. 1-20. DOI: 10.1080/14766825.2016.1150287.

- Saringendyanti, Etty, Agusmanon Yuniadi, Rina Adyawardhina. 2008.
Kampung Naga, Tasikmalaya Dalam Mitologi: Upaya Memaknai Warisan Budaya Sunda. Laporan Penelitian. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Sulistiono, B. 1997.
Nilai-Nilai Budaya Masyarakat di Kampung Naga. Laporan Penelitian. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Vargas-Sanchez, Alfonso. "Explaining Residents' Attitudes to Tourism: Is a Universal Model Possible?" dalam *Annals of Tourism Research* Vol.38 No.2. 2011. Hlm.460-480.
- Wang, Yi-Ping. "A Study of Kinmen Resident's Perception of Tourism Development and Culture Heritage Impact" dalam *Eurasia Journal of Mathematics, Science, & Technology Education*, Vol.12 No.12. 2016. Hlm.2909-2920.
- Zaidan, Esmat dan J. F. Kovacs. "Resident Attitudes towards Tourists and Tourism Growth: A Case Study from the Middle East, Dubai in United Arab Emirates" dalam *European Journal of Sustainable Development* Vol.6 No.1. 2017. Hlm.291-307.
- 2. Buku**
- Dienaputra, Reiza D. 2006.
Sejarah Lisan: Konsep dan Metode. Bandung: Minor Books.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 2016.
Data Arus Kunjungan Wisatawan Objek dan Daya tarik Wisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015. Tasikmalaya.
- Garraghan S. J., Gilbert J. 1957.
A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press.
- Goeldner, Charles R. dan J. R. Brent Ritchie. 2012.
Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- McCabe, Scott. 2009.
"Who is a Tourist? Conceptual and Theoretical Developments" dalam *Philosophical Issues in Tourism*, diedit oleh John Tribe. Bristol: Channel View Publications.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, J. Saldana. 2014.
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. Los Angeles: SAGE.
- Mowforth, Martin dan Ian Munt. 2016.
Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World. Fourth edition. London: Routledge.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999.
Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010.
Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scott, James C. 1998.
Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press.
- Suganda, Her. 2006.
Kampung Naga Mempertahankan Tradisi. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Thompson, Paul dan Joanna Bornat. 2017.
The Voice of the Past. New York: Oxford University Press.
- Telfer, David J. dan Richard Sharpley. 2008.
Tourism and Development in the Developing World. London: Routledge.
- Zed, Mestika. 2008.
Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 3. Surat Kabar**
- Kompas*, 1 Februari 2006.
- Kompas*, 13 Maret 2006
- Koran Tempo*, 3 Februari 2006.
- Koran Tempo*, 28 Maret 2006.
- Liputan 6.com*, 10 Februari 2006.
- Pikiran Rakyat*, 6 Februari 2006.
- Pikiran Rakyat*, 18 Mei 2009.

4. Sumber Lisan/Informan

Ade Suherlin. 2016.

Kuncen Kampung Naga. *Wawancara*,
Kampung Naga, Agustus 2016.

Maun. 2016.

Punduh Kampung Naga. *Wawancara*,
Kampung Naga Agustus 2016-Februari
2017.

Tatang. 2017.

Pemandu Wisata Kampung Naga.
Wawancara, Kampung Naga, Agustus
2016-Februari 2017.

Endut Suganda. 2017.

Warga Kampung Naga. *Wawancara*,
Kampung Naga, September 2016-
Februari 2017.

Sobirin. 2016.

Kepala Desa Neglasari Kecamatan
Salawu Kabupaten Tasikmalaya.
Wawancara, Tasikmalaya, September
2016-Februari 2017.

Asep Herman. 2016.

Kasi Bina Wisata Disparbud
Kabupaten Tasikmalaya. *Wawancara*,
Tasikmalaya, Oktober 2016.